

PEKERJA ANAK DI KOTA SURAKARTA
(Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

VICTOR ANDARU DANISWARA
C100130259

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PEKERJA ANAK DI KOTA SURAKARTA
(Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

VICTOR ANDARU DANISWARA
C100130259

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

PEKERJA ANAK DI KOTA SURAKARTA (Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)

Oleh:

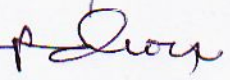
VICTOR ANDARU DANISWARA
C100130259

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari .Rabu, 9 Agustus.2017.....
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

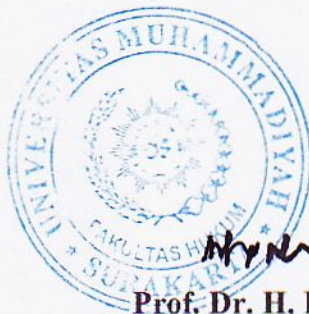
Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()



Dekan,


Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum

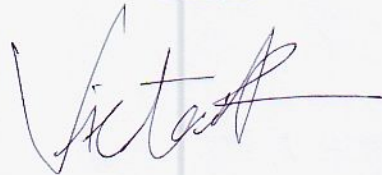
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Agustus 2017

Penulis



VICTOR ANDARU DANISWARA
C100130259

PEKERJA ANAK DI KOTA SURAKARTA (Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)

Abstrak

Membahas salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak. Isu ini telah mengglobal karena sudah begitu banyak anak-anak di dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk pekerjaan tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bias ditolerir. Maka penulis membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak serta secara khusus ingin mengupas bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *pekerja anak, hak anak, perlindungan anak*

Abstract

Discussing one of the issues of children who should receive special attention, is the issue of child labor. This issue has been globalized because there are so many children in the world who go to work at school age. In fact, the issue of child labor is not merely the issue of children doing jobs by earning wages, but closely related to hazardous work, hampering access to education and impeding the physical, psychological and social development of children. Even in certain cases and forms of employment child labor has been included as a qualification for children working in the most intolerable situations. So the author discusses how the implementation of legal protection against child labor as well as specifically want to explore how the implementation of the protection of child labor in Law No. 13 of 2003 on Manpower and Law No. 35 of 2014 on Child Protection.

Keywords: *child labor, child protection, child rights*

1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera, menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.²

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2: *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*³

Pada hakekatnya, anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam

¹Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1.

²Lenny N. Rosalin, “Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak”, <http://www.kotalayakanak.org>, (13 Februari 2017) pukul 21.00

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2.

suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja anak, antara lain di sektor informal dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁴

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan-lapangan.⁵ Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Surakarta. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer yaitu studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder dari hasil wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pekerja Anak di Indonesia: Karakteristik dan Kondisi Kerja

Fenomena pekerja anak, khususnya sektor informal yang bekerja karenafaktor ekonomi yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, akhir-akhir ini menunjukkan permasalahan tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Dalam arti bahwa anak-anak tersebut memiliki keresahan ganda karena selain mereka berhadapan dengan masalah pekerjaan, juga dihadapkan pada perampasan hak yang sering muncul dalam bentuk-bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan. Yang lebih memprihatinkan lagi dalam kenyataan dijumpai bahwa pekerja anak, berasal dari kemelut kemiskinan, dalam arti orangtua mereka miskin dengan segala keterbatasan (pendidikan rendah, pendapatan minimum, gizi kurang, kesehatan rendah), sehingga timbul pandangan dari sebagian masyarakat bahwa pekerja anak bukanlah suatu permasalahan melainkan sebagai suatu hal yang positif.⁶

⁴Syamsuddin, 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*. Jakarta: Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia 1997, hal 1

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal, 53.

⁶Sri Prastyowati, "Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. II, No.4*, (1 Juni 2017) hal 6.

Isu sentral mengenai pekerja anak timbulnya konsekuensi negatif dari usia yang terlalu dini untuk bekerja, yang hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Untuk itu, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana menanggulangi masalah pekerja anak ini agar anak tidak terjerumus ke jurang permasalahan yang lebih dalam dan lebih kompleks. Bagaimanapun pekerja anak harus diselamatkan segera dari bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan mereka.⁷

International Labor Organization (ILO) memperkirakan bahwa terdapat lebih banyak anak perempuan di bawah usia enam belas tahun yang bekerja di bidang jasa rumah tangga dibandingkan dengan kategori pekerjaan buruh anak yang lain. Indonesia, di mana terdapat ratusan ribu anak perempuan yang melakukan pekerjaan berat sebagai pekerja rumah tangga, tidak terkecuali. Menurut ILO, saat ini ada 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, sedikitnya 688.132, sebagian besar adalah anak-anak perempuan di bawah usia delapan belas tahun, adalah pekerja rumah tangga-anak.⁸

Kondisi pekerja anak sangat rentan dengan kekerasan dan diskriminasi. Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap pekerja anak sebenarnya telah dimulai sejak dalam lingkup keluarganya sendiri, ketika orangtua sudah tidak mampu menyekolahkan mereka. Anak seringkali dianggap sebagai beban sosial dan ekonomi keluarga, sehingga pilihan untuk melepaskan beban sosial ekonomi keluarga dengan cara dikawinkan pada usia yang sangat dini atau bekerja, merupakan alternatif pilihan yang sangat rasional dan tak terelakkan. Menjadi PRTA merupakan pekerjaan yang paling mudah dan memungkinkan untuk mereka karena tidak membutuhkan persyaratan pendidikan formal, persyaratan administrasi, keterampilan dan keahlian khusus sehingga setiap orang dapat dengan mudah memasuki lapangan kerja ini.⁹

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak

Faktor lain tingginya tingkat penawaran pekerja anak menunjukkan suramnya pencapaian dunia pendidikan kita. Tingginya angka putus sekolah di

⁷Abu Huraerah, 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Ed. Rev., Cet. Ke-2, Bandung: Nuansa, hal 83.

⁸Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Untuk Perempuan), "Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak, Segera Wujudkan," <<http://www.lbh-apik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>>, diakses 15 Juni 2017.

⁹Andri Yoga Utami, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak): Fenomena Pekerja Anak Yang Terselubung dan Termarginalkan", *Jurnal Perempuan* No. 39:46.

tingkat SD (Sekolah Dasar) dan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) menyebabkan anak yang tidak memiliki aktivitas ini cenderung bekerja. Diskriminasi untuk anak perempuan melanjutkan sekolah didorong oleh pandangan bahwa setinggi-tingginya anak perempuan sekolah pasti masuk dapur juga setelah bersuami. Bagi anak, bekerja menjadi pekerja anak merupakan alternatif termudah dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti buruh pabrik yang membutuhkan ijazah, minimal setingkat SLTP atau SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).¹⁰

Beberapa ahli mengemukakan bahwa ada beberapa alasan yang melatarbelakangi timbulnya pekerja anak antara lain, alasan ekonomi, sosiologis, dan psikologis.¹¹

Pertama, alasan ekonomi, dalam hal ini anak-anak diharapkan untuk cepat dapat membantu mencari nafkah untuk orangtuanya. Alasan ekonomi selalu dikaitkan dalam hubungan bantuan antara orangtua dengan anak sehingga anak harus selalu membantu orangtua sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Bagi orangtua, bekerjanya anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang positif karena dengan bekerja anak akan belajar mengenal dunia kerja, memenuhi keinginan sendiri. Berkaitan dengan alasan ekonomi, sebagai penyebab anak bekerja juga terungkap dari hasil penelitian dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Data Informasi Anak (DIA), dan Childhope (Filipina) menemukan bahwa mayoritas pekerja anak tidak bersekolah bahkan cenderung tidak memiliki keinginan untuk sekolah (Kliping BPKS 2000). Dengan pernyataan tersebut dapat pula dikatakan bahwa di satu sisi, masuknya anak dalam dunia kerja dapat dianggap sebagai sesuatu yang positif, yaitu dengan perolehan penghasilan yang dipandang anak sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi orangtua, meskipun di sisi lain secara tidak sadar mereka telah kehilangan sebagian atau bahkan seluruh hak yang selayaknya untuk tumbuh kembang yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, mendapat perlindungan dan kasih sayang.

Kedua, alasan sosiologis, mengemukakan bahwa hal ini berhubungan dengan watak “sosial” kelas buruh. Menurut Rollf, “watak sosial” ini

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sri Prastyowati, *Loc. Cit.*, Hlm 7-8.

menyebabkan tingkah laku seseorang sangat terikat lingkungan.¹² Hal ini merupakan alasan berikutnya yaitu sekolah formal dirasakan sebagai suatu pelajaran yang berbau kelas menengah sehingga anak-anak dari lingkungan “lebih rendah” kurang terdorong untuk melanjutkan sekolahnya, dan lebih terdorong untuk memasuki dunia kerja. Anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, maka sektor informal akan menjadi tempat bekerja yang paling memungkinkan. Hasil penelitian lain menemukan bahwa anak-anak Indonesia lebih banyak mengalami putus sekolah pada usia 13-18 tahun. Hal ini disebabkan dalam usia tersebut anak-anak sudah dibutuhkan tenaganya untuk membantu orangtua mencari nafkah. Bagi sebagian orangtua hal semacam ini dipakai sebagai *frame of reference* yang sangat sederhana, dengan harapan anak dapat memberikan keuntungan instrumental bagi mereka. Hal ini akan berpengaruh terhadap *frame of reference* bagi anak-anak sendiri yang membuat mereka kurang memiliki motivasi untuk melanjutkan sekolah.

Ketiga, alasan psikologis, remaja ingin mewujudkan dirinya sendiri, ingin mempunyai nafkah sendiri, dan menentukan hidupnya sendiri, untuk mencapai keinginan tersebut dunia kerja dapat dianggap tempat yang menjanjikan. Dalam kondisi seperti ini mereka sudah menempatkan dirinya sendiri sebagai orang dewasa. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari tempat bekerja dengan orang dewasa adalah bahwa tempat bekerja tersebut bukan semata-mata tempat untuk memperoleh penghasilan, belajar bagaimana bekerja yang baik, dan bagaimana menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain.

Ada tiga faktor yang menyebabkan anak terpaksa bekerja: (1) Pemerintah kurang mengupayakan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan tidak member jaminan sosial yang cukup bagi anak-anak dan keluarga miskin; (2) Keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi tidak memiliki pilihan lain sehingga terpaksa mengirimkan anaknya bekerja agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka; dan (3) Kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa anak-anak harus turut memikul tanggung jawab keluarga dengan bekerja pada usia yang muda.¹³

¹²F.J. Monks, A.M.P. Knoers, Siti Rahayu Haditono, 2001. *Psikologi Perkembangan (Pengantar dalam Berbagai Bagiannya)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal. 103.

¹³Endi Djunaedi, “Penelusuran Pekerja Dibawah Umur di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Reformasi Hukum Vol. IX, No. 1*, 55.

Pada sisi lain timbul pula pertanyaan mengapa wirausahawan mempekerjakan anak. Jawabannya juga ada tiga faktor, yaitu: (1) Anak-anak tidak berdaya untuk membela hak-hak mereka dan mereka dapat dimanfaatkan; (2) Anak-anak masih muda, tidak berdaya, patuh, dan dapat dipaksa dengan “ditakut-takuti” untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh orang dewasa; dan (3) Anak-anak dapat dibayar lebih rendah dari orang dewasa, mereka tidak mendapatkan asuransi kesehatan serta tunjangan-tunjangan lainnya dan mereka dapat dengan mudah diberhentikan sewaktu-waktu.¹⁴

3.2.1. Berkenaan Dengan Proses *Trafficking*

Perdagangan anak adalah salah satu cara usaha ilegal yang menyuburkan penggunaan tenaga kerja anak. Mengapa perdagangan anak tetap ada padahal sudah dilarang? Darmoyo dan Adi menunjuk kelamahan internal peraturan sebagai alasan inefektivitas sebuah peraturan. Selanjutnya, sosialisasi hukum adalah faktor lain kurangnya efektivitas pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran masyarakat atas peraturan tertentu merupakan akibat ketidaktahuan mereka mengenai peraturan itu. Sebaliknya, peneliti lain menunjuk lemahnya penegakan hukum sebagai sebab belum teratasinya masalah perdagangan anak. Indikator lemahnya penegakan hukum ini, antara lain, kenyataan bahwa penegakan hukum hanya ditujukan kepada anak yang sebenarnya merupakan korban perdagangan, tidak ada tindakan yang ditujukan pada pengguna jasa, perantara/calok”.¹⁵

Mengetahui sebuah peraturan, tentu saja merupakan *condition sine qua non* bagi kepatuhan terhadap hukum. Perilaku seseorang dapat sesuai dengan hukum yang berlaku, namun hal itu merupakan kebetulan saja. Apa yang kita harapkan adalah kepatuhan terhadap hukum atau peraturan bukanlah suatu kebetulan, melainkan akibat dari kesadaran akan makna hukum atau peraturan. Maka, sosialisasi perlu dilakukan dalam rangka menumbuhkan pengertian dan kesadaran di pihak masyarakat tentang eksistensi dan manfaat sebuah hukum atau peraturan. Maka sosialisasi perlu dilakukan dalam rangka menumbuhkan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Saliman dan Johanes L. Billy, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Keluarga (Tinjauan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Keluarga,” *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX No.2*, 39.

pengertian dan kesadaran di pihak masyarakat tentang eksistensi dan manfaat sebuah hukum atau peraturan. Namun, berkenaan dengan hukum Indonesia, sosialisasi hukum merupakan masalah tersendiri. Hal yang sering dialami oleh kita bersama, yakni bahwa ada berbagai peraturan yang mencoba mengatur perilaku kita tanpa kita sendiri tahu bahwa ada peraturan seperti itu. Jika mengetahui saja belum, apalagi memahaminya.¹⁶

3.2.2 Berkenaan dengan Pekerjaan dan Hasil Pekerjaan Anak

Dalam beberapa studi ditunjukkan bahwa trafiking itu fungsional untuk mereka yang “diperdagangkan” (selanjutnya disebut “pekerja”) dan keluarganya, bagi “konsumen” dan terutama bagi “pelaku *trafficking*”. *Trafficking* atau perdagangan anak itu fungsional bagi beberapa pihak. Berikut akan dijelaskan mengenai fungsi pekerja anak bagi pihak-pihak terkait.¹⁷

3.2.2.1 Fungsi Bagi Pekerja Anak

Ketika anak berpindah dari kampung ke kota untuk menjadi pekerja rumah tangga tentu mereka tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam kegiatan “perdagangan anak”. Mereka juga tidak bermaksud melanggar hukum demi alasan ekonomis dan lain-lain. Bagi mereka, berpindah ke kota dan menjadi pekerja rumah tangga merupakan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Maka, analisis fungsional tampaknya tidak relevan di sini. Namun, melihat alasan mereka berpindah ke kota dan alasan mengapa bertahan dalam pekerjaannya kendati mengalami “eksploitasi”, teori fungsional tetap dimanfaatkan. Jadi analisis tidak mengena langsung dengan persoalan trafiking, tetapi pada alasan untuk memasuki dunia kerja dan tidak mau meninggalkannya meskipun mengalami hal-hal yang menyakitkan.¹⁸

3.2.2.2 Fungsi Bagi Keluarga

Pentingnya pekerjaan anak-anak bagi kelangsungan hidup keluarganya merupakan suatu kenyataan yang sulit dibantah mengingat sebagian besar penghasilan yang diperoleh anak dari pekerjaannya diberikan kepada orangtua.

¹⁶Timboel Siregar, “Pekerja Indonesia di Persimpangan Jalan,” *ALNI (Jurnal Analisis Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum Perburuhan)* Vol. 1, No. 2, 77.

¹⁷Hubertus Ubur, “Masalah Trafiking Anak untuk Menjadi Pekerja Rumah Tangga: Penjelasan Teori Fungsional dan Teori Pilihan Rasional,” *Atma nan Jaya, Majalah Ilmiah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun XX* No. 2, 82.

¹⁸Siti Aminatun dan Sri Yuni Murti Widayanti, “Penanganan Permasalahan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol. III, No. 8, (Juni 2004): 15.

Meskipun kenyataan tersebut di Indonesia belum cukup terbukti secara kuantitatif melalui penelitian yang sistematis, tetapi mulai ada beberapa penelitian diantaranya yang dilakukan dalam program IPEC/ILO (*International Programme for the Elimination of Child Labour/International Labour Organization*) yang menunjukkan pentingnya kontribusi penghasilan buruh anak dalam membantu pendapatan rumah tangga orang tuanya. Hampir 44% dari anak yang bekerja memberikan kontribusi sebesar 20%-75% pada pendapatan rumah tangga orangtuanya. Bahkan 16,6% diantaranya mampu menopang 75% lebih pendapatan orangtuanya (Haryadi dalam *Bisnis Indonesia*). Persentase sumbangan hasil kerja anak-anak tersebut signifikan bagi keluarga miskin oleh karena itu pada keluarga miskin terdapat kecenderungan untuk memiliki anak lebih banyak agar dapat dikerahkan untuk mencari penghasilan secara langsung atau mendukung kegiatan pencarian penghasilan.¹⁹

3.2.2.3 Fungsi Bagi Pengguna Jasa

Dari sisi pasar tenaga kerja upahan setidaknya terdapat dua teori yang mencoba menjelaskan mengapa anak-anak bekerja, ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Teori yang mendukung sisi penawaran menyatakan kemiskinan merupakan sebab utama yang mendorong anak-anak bekerja untuk dapat menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Dorongan tersebut bisa datang dari diri anak-anak sendiri maupun dari orang tua. Dengan bekerja, anak-anak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan orang tuanya. Teori yang berpijak pada sisi permintaan menyatakan bahwa dengan mempekerjakan anak-anak (dan perempuan dewasa) yang dianggap sebagai pencari nafkah kedua dan mau dibayar murah, wirausahawan dapat melipatgandakan keuntungannya. Pada kenyataannya kedua teori tersebut berlaku secara bersama-sama menciptakan pasar tenaga kerja anak.²⁰

3.3 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Pekerja Anak

Jumlah Pekerja Rumah Anak mengalami peningkatan tiap tahunnya dan pada tahun 2009 *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan, di

¹⁹Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, 1995, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Bandung: Yayasan AKATIGA, hal. 19.

²⁰ Indrasari Tjandraningsih, 1995, *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Bandung: Yayasan AKATIGA, hal. 6.

Indonesia terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak. Sedikitnya 700.000 orang pekerja rumah tangga di Indonesia berusia di bawah 18 tahun dan 99% di antaranya adalah anak perempuan yang rentan penyiksaan dan eksploitasi tenaga. Bahkan, laporan lembar fakta ILO saat ini menunjukkan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah pekerja rumah tangga itu berusia di bawah 15 tahun dan hampir 20% pekerja rumah tangga anak bekerja selama lebih dari 15 jam.²¹

Masalah pekerja anak penting dan mendesak untuk dibahas selain karena jumlahnya yang sangat signifikan juga menyangkut masa depan anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang. Mereka masih membutuhkan jaminan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta membutuhkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan fisik, mental, dan sosial. Bila mengacu pada Konvensi Internasional yang menjamin hak anak yaitu *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang hak-Hak Anak) yang memuat pasal-pasal mengenai hak anak antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari segala bentuk eksploitasi serta hak partisipasi, maka anak yang dipekerjakan sebagai pekerja anak masuk dalam kriteria eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak lainnya. Mengapa? Karena pekerjaan PRT bila dikerjakan oleh anak maka dapat masuk dalam kriteria pekerjaan yang berbahaya (*hazardous*) dan *nature* pekerjaannya yang eksploitatif sehingga menyebabkan anak yang bekerja menjadi pekerja anak hampir kehilangan seluruh hak-haknya sebagai anak. Indikator pekerja anak masuk dalam kriteria eksploitatif (sehingga anak kehilangan hak-haknya) antara lain disebabkan karena jam kerja panjang, standar upah yang tidak jelas, hilangnya kesempatan sekolah dan bermain, tidak ada kesempatan libur, tidak diberi kesempatan mengenyam pendidikan (sebagian besar); tinggal terpisah dengan keluarga, berisiko terhadap perlakuan kekerasan majikan maupun calo baik fisik, psikis, dan seksual.²²

Eksploitasi sering merupakan kata kunci dalam pembahasan masalah buruh anak. Titik bahasan yang kerap ditinjau pada permasalahan buruh anak

²¹“700 Ribu Pekerja Anak Rentan Penyiksaan”, <<http://www.poskota.co.id/kriminal-populer/2009/06/11/700-ribu-pekerja-anak-rentan-penyiksaan>>, Pos Kota, 11 Juni 2009, diakses 22 Juni 2017.

²²Andri Yoga Utami, *Loc. Cit.*, hal. 53.

yaitu pengeksploitasian tenaga anak-anak. Eksploitasi juga yang sesungguhnya merupakan inti persoalan yang menyangkut buruh anak. Berbagai macam aliran atau pendekatan dalam upaya mengatasi permasalahan ini, baik *abolitionism* yang bertujuan menghapus buruh anak, *protectionism* yang bertujuan melindungi buruh anak, maupun *liberationism* yang bertujuan menjamin hak anak untuk bekerja pada dasarnya menolak eksploitasi.²³

Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah “tidak boleh kurang dari usia tamat wajib sekolah dan, dalam keadaan apapun, tidak boleh kurang dari 15 tahun.” Konvensi ini lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang nasional “juga dapat mengizinkan dipekerjakannya mereka yang berusia sedikitnya 15 tahun tetapi belum menyelesaikan wajib sekolah” asalkan pekerjaan tersebut “tidak membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka,” dan tidak memberikan kesulitan bagi mereka untuk bersekolah atau berpartisipasi dalam program latihan kejuruan.²⁴

Menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia, pekerja di sektor formal hanya diperbolehkan bekerja tujuh jam per hari dan empat puluh jam per minggu selama enam hari kerja per minggu atau delapan jam kerja per hari dan empat puluh jam per minggu selama lima hari kerja per minggu. Pekerja di sektor formal memiliki hak atas minimal setengah jam istirahat setelah bekerja selama empat jam berturut-turut, satu hari libur setelah enam hari kerja per minggu, atau dua hari libur setelah lima hari kerja per minggu, dan, paling sedikit, periode cuti tahunan selama dua belas hari kerja, apabila mereka telah bekerja selama dua belas bulan berturut-turut. Bagian penjelasan pada ayat-ayat mengenai jam kerja dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa “mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya.” Tetapi mereka yang bekerja di sektor informal, seperti misalnya pekerja bengkel, sama sekali tidak tercakup dalam perlindungan undang-undang ini. Dengan kata lain, majikan dari pekerja rumah tangga tidak memiliki kewajiban hukum untuk membatasi hari kerja, memberikan istirahat di sela kerja, atau memberikan libur

²³Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Op. Cit.*, hal. 15.

²⁴*Ibid.*

mingguan atau tahunan.²⁵

3.3.1 Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah

Di negara berkembang permasalahan PRTA adalah fenomena yang sangat mudah ditemui dan merupakan salah satu bentuk pekerjaan tradisional. Seperti digambarkan oleh seorang peneliti dari India bahwa PRTA sulit dijangkau dan diketahui kondisinya karena berada di balik pintu rumah dan di bawah pengawasan majikannya.

Child Domestic Workers is one of the most common and traditional forms of Child Labour. It is a widespread practice in many countries with employers recruiting children from rural areas to work in their houses. These children being hidden behind the closed doors of the houses and guarded by the privacy of personal homes, remain unseen and unheard....(Arunodhaya, 2000).²⁶

Sekalipun berbagai peraturan telah ditetapkan untuk melindungi pekerja anak, pada kenyataannya tidak sedikit pengusaha atau majikan yang masih memperlakukan anak-anak dengan buruk, seperti praktik eksploitasi, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, dan bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Oleh karena itu, Mendelievich mengatakan isu utama sesungguhnya bukan anak yang bekerja melainkan adanya potensi untuk mengeksploitasi anak.²⁷

3.3.2 Permasalahan Yang Diatasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Proses advokasi terhadap persoalan pekerja anak ini telah mulai diinisiasi beberapa organisasi seperti Yayasan Kakak yang ada di Surakarta. Usaha yang mereka lakukan antara lain mengkampanyekan libur sehari dalam seminggu bagi pekerja anak dan pembatasan jam kerja, mengupayakan kontrak kerja, sosialisasi perspektif yang menghargai status mereka sebagai pekerja dan perlindungan hak-hak mereka baik sebagai pekerja, perempuan, anak (dalam beberapa kasus), dan warga negara. Di sisi lain, beberapa upaya bagi para pekerja anak sendiri seperti program-program pemberdayaan sangat penting disediakan bagi mereka dan

²⁵Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, "Pencanangan Program Penanggulangan Pekerja Anak," *Majalah Tenaga Kerja* No. 38, 12.

²⁶Andri Yoga Utami, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak): Fenomena Pekerja Anak Yang Terselubung dan Termajinalkan", *Jurnal Perempuan* No. 3, : 46.

²⁷Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), Hlm. 3.

sudah mulai banyak difasilitasi beberapa lembaga. Di antaranya, termasuk, training tentang hak-hak perempuan, hak pekerja, hak anak, dan hak asasi manusia secara umum Program pengembangan keterampilan dan pengetahuan, termasuk pendidikan luar sekolah bagi pekerja anak juga sangat penting dilakukan. Pengorganisasian sebagai bagian dari konsolidasi gerakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja anak menjadi strategi penting yang perlu dilakukan. Tentu saja, program-program tersebut perlu dilakukan secara inovatif agar bisa disesuaikan dengan kondisi kerja mereka.²⁸

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, pada dasarnya anak yang bekerja tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah atau serba kekurangan. Tampaknya anak bekerja merupakan suatu pilihan dalam keadaan sosial ekonomi keluarga yang demikian, keadaan tersebut melahirkan motivasi atau alasan anak-anak untuk bekerja yaitu guna memenuhi kebutuhan yang sebelumnya orang tua belum mampu untuk memenuhinya serta untuk membantu perekonomian keluarga. Karena tidak sekolah lagi dan ingin mempunyai penghasilan sendiri. anak-anak dari satu sisi terlihat lebih mandiri bisa memperoleh penghasilan sendiri dan tidak tergantung lagi kepada orang tua, namun disisi lain akan melahirkan persoalan yang bias lebih kompleks lagi yaitu menimbulkan perilaku menyimpang karena secara psikologis anak-anak terlalu cepat untuk menerima keadaan ini yang belum sesuai dengan perkembangan dan dari akibat ini akan tercermin dari tingkah laku anak.

Kedua, posisi pekerja anak belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional. Di Surakarta juga belum ada Perda yang mengatur tentang itu, tetapi yang sangat di sayangkan di kota Surakarta sendiri sudah di kukuhkan sebagai Kota Layak anak yang harusnya dimana anak tidak ada yang bekerja dan terbebas untuk membantu perekonomian keluarga. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemenuhan Hak-hak pekerja anak masih belum terlaksana dengan optimal.

²⁸Diah Irawaty, "PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan," <<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/>>, 18 Juni 2017.

Karena kurang optimalnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemenuhan hak-hak pekerja anak sehingga sampai sekarang belum ada regulasi yang khusus mengatur mengenai pekerja anak yang mengikat secara nasional, hanya dikaitkan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. Selama ini pemerintah daerah hanya melindungi anak yang bekerja dengan perda yang di masukkan menjadi satu dengan perda perlindungan anak. Akan lebih baik lagi pemerintah daerah membuat perda tersendiri mengenai hak dan kewajiban anak yang bekerja.

4.2. Saran

Pertama, dibuatnya sebuah PERDA mengenai perlindungan hak dan kewajiban anak yang bekerja agar diatur juga mengenai sanksinya, sebab peraturan yang ada masih kurang mengikat dengan adanya sebuah perda diharapkan akan dibuat mengenai pemberian sanksi yang memperkejakan anak untuk bekerja.

Kedua, masyarakat lebih peka lagi terhadap adanya pekerja anak di bawah umur atau anak yang bekerja seperti halnya orang dewasa lebih diawasi lagi karena dapat mempengaruhi pola pikir mereka dalam berkehidupan.

Ketiga, orang tua yang anaknya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga harus memperhatikan anaknya dan mengajarkan anak tentang pentingnya pendidikan, serta memberikan perhatian dan pembinaan kepada anaknya.

Keempat, kepada pemerintah serta masyarakat agar memperhatikan pendidikan anak usia sekolah yang bekerja dan memberikan penegakan hukum terhadap masyarakat yang mempekerjakan anak di bawah umur.

PERSANTUNAN

Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persambahkan kepada ibu, ayah dan kakak saya tercinta yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan semangat kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Tak lupa pembimbing skripsi saya yang saya hormati yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini. Serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah medidik saya selama perkuliahan. Dan teman-teman yang berperan penting dalam memberikan semangat dan motivasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Yoga Utami, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak): Fenomena Pekerja Anak Yang Terselubung dan Termajinalkan", *Jurnal Perempuan* No. 3,: 46.
- Diah Irawaty, "PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan," <<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/>>, 18 Juni 2017.
- Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, "Pencanangan Program Penanggulangan Pekerja Anak," *Majalah Tenaga Kerja* No. 38, 12.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), Hlm. 3.
- Lenny N. Rosalin, "Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak", <http://www.kotalayakanak.org>, (13 Februari 2017) pukul 21.00
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal, 53.
- Sri Prastyowati, "Kajian Empirik Kondisi Pekerja Anak Sektor Informal di Wilayah Perkotaan," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* Vol. II, No.4, (1 Juni 2017) hal 6.
- Syamsuddun, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja* (Jakarta: Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia 1997), hal 1